BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Hal tersebut dikarenakan lembaga keuangan ini memberikan fasilitas di bidang keuangan serta memutar arus uang di dalam suatu perekonomian. Adanya lembaga keuangan ini mampu menampung dan memberikan pinjaman sebagai wadah yang dapat mengatasi seluaruh kebutuhan keuangan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk menunjang serta memperlancar pembangunan ekonomi pada suatu daerah kedepannya. Lembaga keuangan khususnya di Indonesia di bagi menjadi 2 yaitu: 1) Lembaga keuangan yang memberikan fasilitas serta jasa perbankan bagi masyarakat untuk melakukan penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Lembaga keuangan ini disebut lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank meliputi: bank sentral, bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 2) Lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana dengan membawa surat-surat berharga yang dibawa oleh calon nasabah. Lembaga keuangan ini disebut lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank meliputi: pasar modal, pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Salah satu lembaga keuangan yang termasuk kedalam kategori lembaga keuangan non-bank dengan menjalankan intermediary keuangan serta merupakan lembaga keuangan satu-satunya yang tumbuh dan berkembang di daerah Bali yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

LPD merupakan unsur dari Desa Adat Pakraman dengan fungsi yang dijalankan yakni mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Selain itu, tujuan berdirinya sebuah LPD di setiap desa adat di Bali, dilihat pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yakni untuk mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan melalui kegiatan masyarakat dengan menabung dan menyediakan kredit bagi usaha kecil. LPD juga merupakan lembaga milik Desa Pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan bUdayana kepada anggotanya, melihat hal tersebut, perlu ditingkatkan kinerja serta dilestarikan keberadaanya (Suartana, 2009). LPD pertama kali dipelopori oleh Gubernur Bali pada saat itu, Prof. Ida Bagus Mantra. Ide pendirian LPD ini beliau dapatkan setelah beliau berkunjung ke Sumatera Barat pada tahun 1985, hingga saat ini hampir seluaruh kabupaten di Bali memiliki LPD. Lembaga Perkreditan Desa sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa serta memenuhi apa yang menjadi kepentingan Desa Pakraman tersebut. LPD mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa diantaraanya: 1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, 2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, 3) sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat, 4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Partamawati, 2008). Pendirian LPD ini tentu memiliki karakteristik dengan desain yang khusus serta memiliki payung hukum yang jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. LPD sebagai suatu lembaga yang didirikan khusus untuk kepentingan dalam mensejahterakan

masyarakat Desa Pakraman. Dalam kegiatannya LPD hanya melayani masyarakat di wilayah Desa Pakraman saja, LPD tidak melayani masyarakat di luar wilayah Desa Pakraman tempat LPD tersebut beroperasi. Karena hal tersebut LPD ini dikatakan lembaga keuangan yang memiliki sifat khusus. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 ini digunakan untuk beroperasi dan melakukan fungsi yang sama dengan bank dalam hal perorganisasian dana simpanan dari masyarakat desa pakraman dan memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Perkembangan LPD di Bali cukup pesat, jumlah LPD saat ini sudah mencapai 1.436 LPD yang tersebar di seluaruh kabupaten. Kabupaten dengan jumlah LPD terbanyak adalah kabupaten Tabanan dengan jumlah LPD 308. Kemudian disusul oleh kabupaten Gianyar dengan jumlah LPD 270 dan kabupaten Karangasem yang menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah LPD sebanyak 190 LPD. Proyek pendirian LPD ini mulai dilakukan serta keberadaan LPD mulai diatur di bawah Peraturan Daerah (Perda) yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah dikukuhkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Isu yang terjadi yakni, menguatnya tuntutan akan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah. Salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan salah satu lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan, tentu saja harus membuat suatu bentuk

pertanggungjawaban profit yakni dalam bentuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 17 menjelaskan bahwa *prajuru* LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada *Bendesa* dan LPLPD. Standar akuntansi yang digunakan oleh LPD yakni Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada standar akuntansi keuangan umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis yakni mengatur transaksi yang dilakukan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi serta relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 39 ayat 3 menyatakan bahwa LPD diakui keberadaanya berdasarkan hukum serta tidak tunduk terhadap Undang-Undang yang mengharuskan untuk melakukan pelaporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, menggunakan standar akuntansi keuangan yang ditunjuk untuk akuntabilitas publik. Melihat hal tersebut standar akuntansi yang cocok digunakan oleh Lembaga Perkreditan Desa yakni Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Penggunaan SAK-ETAP ini diharapkan LPD mampu menyusun laporan keuangannya yang lebih dapat diaudit. Hal tersebut akan berdanpak pada hasil laporan keuangan yang handal dalam penyajian laporan keuangan itu sendiri. Dalam aktivitasnya LPD harus melaporkan laporan keuangannya kepada pihak Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD). LPLPD ini merupakan suatu lembaga pemberdayaan yang memang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan

pemberdayaan terhadap LPD. Kegiatan pemberdayaan ini telah dijelaskan pada Peraturan Gubernur Bali No. 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 58 ayat 1. Tugas LPLPD ini mencangkup pemberdayaan LPD dengan kegiatan penguatan teknis yang memiliki keterkaitan terhadap administrasi, pembukuan, kredit dan lain-lainnya. Melakukan pengauditan atau pengecekan rutin, pengelolaan anggaran perlindungan LPD, pengelolaan anggaran perlindungan LPD, pengelolaan anggaran penjaminan simpanan LPD serta pengendalian masalah yang terjadi di LPD.

Laporan keuangan ini merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang didalamnya terdapat informasi yang relevan, mengenai posisi keuangan dan seluaruh transaksi yang dilakukan pada suatu entitas pelaporan selama satu periode. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan yang digunakan oleh pemangku kepentingan ketika membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan pada umumnya terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari berbagai pertimbangan, hal tersebut dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan dapat terlihat lebih baik dan berkualitas.

Kualitas yang dimaksud yakni suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud atau dari segi yang tidak berwujud. Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan yakni untuk memudahkan para pemakai laporan keuangan tersebut untuk segera dapat memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan keuangan dapat

dikatakan berkualitas, diukur dari sejauh mana suatu laporan keuangan yang disajikan tersebut dapat menunjukkan informasi yang benar serta jujur yang nantinya dapat membantu pengguna laporan keuangan ini dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang berkualitas juga harus mencangkup empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni, laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal serta laporan keuangan yang dapat menjadi pembanding dengan laporan keuangan yang telah dibuat pada periode sebelumnya (Pradnya Paramitha, 2019). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan yang berkualitas juga penting dimiliki oleh suatu LPD, karena laporan keuangan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat Desa, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pembangunan pada wilayah desa pakraman, selain itu laporan keuangan tersebut digunakan sebagai tempat pengumpulan dana dan pemberian kredit masyarakat desa pakraman. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan.

Faktor pertama adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan guna mencapai tujuan (Siskarini, 2013) dalam (Romandhon, 2019). Laporan keuangan yang baik tentu saja harus disusun oleh sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan tentunya memahami dunia akuntansi dengan baik.

Hal tersebut akan berpengaruh dengan pemahaman pekerjaanya dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974, Pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu usaha untuk membina serta untuk mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik pengembangan tersebut terjadi di dalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil serta makmur berdasarkan Pancasila. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia.. Karena sumber daya manusia dengan kualitas pendidikannya yang tinggi akan mampu membantu staf lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya terutama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi untuk menyelesaikan permasalah dalam hal penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, selain itu dalam penyusunan laporan keuangan ini, dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Mengenai tingkat pendidikan ini pernah di lakukan oleh (Sukriani, 2018), (Devi, 2017), (Arismawati, 2017) dan (N. L. M. Dewi, 2021) dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, di simpulkan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh (Budiono, 2018) mengenai tingkat pendidikan,beliau menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yakni kualitas pelatihan. Pelatihan merupakan suatu proses untuk melakukan

peningkatan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, keterampilan, keahlian serta pengetahuan karyawan tersebut guna melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan di perusahaan. Suatu pelatihan yang berkualitas, juga sangat mempengaruhi pemahaman karyawan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas juga. Tujuannya untuk mampu menyusun laporan keuangan sendiri dan menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Pelatihan ini merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan berupa penambahan pengetahuan mengenai akuntansi terutama laporan keuangan, menambah keterampilan karyawan dan terakhir yakni mengubah sikap karyawan menjadi lebih baik. Menurut (Suwarni, 2013) dalam (Romandhon, 2019) menyatakan bahwa pelatihan merupakan orientasi dan membantu karyawan untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu sehingga berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Semakin baiknya kualitas pelatihan yang diberikan kepada karyawan, maka akan berdanpak pula terhadap kualitas karyawan tersebut. Hal ini dikarenakan pelatihan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan yang berdanpak pada semakin baiknya kinerja karyawan (Adiputra, 2017). Selain itu, pelatihan yang baik serta berkualitas juga seharusnya memberikan *feedback* kepada mereka yang mengikuti pelatihan dan kepada organisasinya pula. (Sikula, 2011) dalam (Dodopo, 2019) menyatakan bahwa pelatihan digunakan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi. Ada beberapa penelitian mengenai kualitas pelatihan pernah dilakukan diantaraanya: oleh (Adiputra,

2017), (Sukriani, 2018), (Dodopo, 2019) dan (Romandhon, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, sama-sama menunjukkan bahwa kualitas pelatihan karyawan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Budiono, 2018) menyatakan bahwa pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yakni sistem informasi akuntansi. Faktor lainnya yang mendukung laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input, proses dan output yang baik dan tepat. Ketiga aspek tersebut membuat terintegrasi dan berkelanjutan sebagai fondasi keuangan yang baik. Pada umumnya tujuan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan danpak yang luar biasa (Jones, 2008) dalam (Zulfah, 2017). Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan perangkat sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, mencatat serta mengelola data-data keuangan beserta akuntansinya yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing, sistem informasi akuntansi sangat diperlukan karena dapat menyediakan informasi keuangan dan akuntansi. Selain untuk meningkatkan daya saing, sistem informasi juga efektif dalam pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. Maka hal tersebut dapat bergerak

senada dengan transparansi dari pengelolaan keuangan. Sistem informasi ini dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely),* akurat (*accurate)* dan dapat dipercaya (*reliable)* (Widjajanto, 2001) dalam (L. A. P. Dewi, 2017).

Harapan diterapkannya penggunaan sistem informasi akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yakni dapat menghasilkan output yang semakin baik dan terjadinya peningkatan kinerja karyawan. Karena biasanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi didasarkan pada input yang baik, kemudian proses yang baik, dan diakhiri dengan output yang baik pula. Penelitian mengenai sistem informasi ini pernah dilakukan oleh (L. A. P. Dewi, 2017) kemudian dilakukan pula oleh (Zulfah, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, sama-sama menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan pemilihan pengurus LPD. Pemilihan pengurus LPD biasanya dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa adat setempat. Pemilihan melalui musyawarah desa adat untuk pengelolaan LPD ini mengakibatkan sering terjadi proses penyusunan laporan keuangan yang terhambat dikarenakan pengurus yang tidak ahli dibidangnya dan minimnya pemahaman pengurus untuk pengelolaan serta penatausahaan keuangan terhadap penyusunan laporan keuangan LPD. Sedangkan semakin menguatnya tuntutan akan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah

salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten terluas ke-4 di Bali. Kabupaten ini merupakan daerah yang memiliki cukup banyak LPD yang masih aktif. Berdasarkan data Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa hingga saat ini jumlah seluaruh LPD di Kabupaten Karangasem sebanyak 190 LPD yang tersebar di setiap kecamatan. Lima tahun terakhir perkembangan LPD di kabupaten Karangasem stabil, tidak mengalami penurunan maupun kenaikan jumlah LPD yang signifikan. Dari segi kuantitas jumlah LPD di kabupaten Karangasem cukup banyak, namun dari segi kualitas, tidak semua LPD yang terdaftar memiliki kualitas yang baik.

Tabel 1. 1

Data Tingkat Kesehatan LPD Kab. Karangasem

Kecamatan	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Belum Beroperasi
Rendang	20	3	2	-	-	1
Sidemen	8	7	2	1	1	-
Manggis	16	2	-	1	-	-
Karangasem	16	1	5	1	-	-
Abang	13	2	2	2	1	-
Bebandem	10	1	3	1	-	-
Selat	16	2	6	-	3	-
Kubu	19	8	7	5	2	-
Jumlah	**118**	**26**	**27**	**11**	**7**	**1**

Sumber:Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, 2021

Dilihat dari Tabel diatas, dari 190 LPD di Kabupaten Karangasem, LPD dengan kategori sehat berjumlah 118. Tetapi masih cukup banyak terdapat LPD yang kurang sehat di Kabupaten Karangasem. Penurunan kesehatan LPD menggambarkan terjadinya penurunan kinerja keuangan LPD tersebut. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangannya.

Untuk penelitian kali ini, dilakukan pada LPD di Kecamatan Manggis. Data dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Karangasem menyatakan bahwa Kecamatan Manggis memiliki 19 desa adat dengan 17 LPD yang masih beroperasi dan 2 LPD yang sudah tidak beroperasi dikarenakan dikarenakan terjadinya kredit macet sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan kurang maksimal. Berikut merupakan LPD yang terdapat di Kecamatan Manggis.

Tabel 1. 2

Daftar LPD pada setiap desa di Kecamatan Manggis

No.	Nama LPD	Nama Kepala LPD	Status
1	LPD Selumbung	I Ketut Darma	Masih aktif
2	LPD Ulakan	Drs. I Nengah Kereg	Masih aktif
3	LPD Antiga	I Made Sumardika	Masih aktif
4	LPD Pesedahan	I Nengah Yasa	Masih aktif
5	LPD Ngis	I Ketut SuMantra	Masih aktif
6	LPD Sengkidu	I Ketut Sulastra	Masih aktif
7	LPD Tenganan Pegeringsingan	I Ketut Sukarata	Tidak aktif
8	LPD Yeh Poh	Mk Ketut Wardana	Masih aktif
9	LPD Gegelang	I Ketut Suryana	Masih aktif
10	LPD Tanah Ampo	-	Tidak aktif
11	LPD Manggis	Drs. I Wayan Putra	Masih aktif
12	LPD Padangbai	Ni Kadek Indra Dewi	Masih aktif
13	LPD Nyuhtebel	I Kadek Tirta	Masih aktif
14	LPD Tenganan Dauh Tukad	I Kadek Ardita	Masih aktif
15	LPD Bukit Catu	Ni Made Lipur Subadri	Masih aktif
16	LPD Apit Yeh	I Ketut Dartia	Masih aktif
17	LPD Gumung	I Nengah Rumiasa	Masih aktif
18	LPD Buitan	I Wayan Warsa	Masih aktif
19	LPD Pekarangan	I Nengah Mudita	Masih aktif

Sumber:Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, 2021

Alasan memilih Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Manggis sebagai tempat penelitian, karena dimasingg-masingg desa di kecamatan ini sudah memiliki LPD dan sejauh ini Lembaga Perkreditan Desa ini masih dominan dipilih masyarakat sebagai lembaga penopang perekonomian desa daripada lembaga keuangan lainnya. Kedua, dapat dilihat dari Tabel 1.2 bahwa LPD di Kecamatan Manggis tergolong sehat. Dari 19 LPD yang ada di Kecamatan Manggis, LPD Sengkidu mengalami perkembangan yang cukup pesat bahkan mendapat penghargaan LPD terbaik. Sedangkan untuk LPD lainnya masih berkembang, bahkan ada pula LPD yang baru mulai bangkit kembali.

Tabel 1. 3

Data Perkembangan LPD di Kecamatan Manggis Tahun 2018-2020

No	Nama LPD	2018				2019				2020			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1	Antiga	1				1				1			
2	Apit Yeh	1				1				1			
3	Buitan	1				1				1			
4	Bukit Catu	1				1				1			
5	Gegelang	1				1				1			
6	Gumung	1				1				1			
7	Manggis		1				1				1		
8	Ngis	1				1				1			
9	Nyuh Tebel	1					1				1		
10	Padang Bai	1				1				1			
11	Pekarangan	1				1				1			
12	Pesedahan	1				1				1			
13	Selumbung	1					1				1		
14	Sengkidu	1				1				1			
15	Tanah Ampo				1				1				1
16	Tenganan Dauh Tukad	1				1				1			
17	Tenganan Pegringsingan			1				1				1	
18	Ulakan	1				1				1			

19	Yeh Poh		1					1				1	
Jumlah		**15**	**2**	**1**	**1**	**13**	**3**	**2**	**1**	**13**	**2**	**2**	**1**

Keterangan: S = Sehat, CS = Cukup Sehat, KS = Kurang Sehat, TS= Tidak Sehat.

(Sumber:Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, 2021)

Dilihat dari Tabel 1.3 mengenai perkembangan LPD di Kecamatan Manggis, bahwa selama 3 tahun terakhir LPD di Kecamatan Manggis yang tergolong sehat dari 2018 hingga 2019 mengalami penurunan. Kemudian LPD di Kecamatan Manggis yang tergolong cukup sehat mengalami perkembangan yang naik turun. sedangkan untuk LPD yang tergolong kurang sehat mengalami peningkatan. Penggolongan kesehatan LPD ini tidak terlepas dari laporan keuangan yang disusun oleh para pengurus. Hal tersebut mengasumsikan bahwa ketika laporan keuangan yang disusun telah mengikuti indikator laporan keuangan yang lengkap serta berkualitas, maka pihak pemangku kepentingan ini dapat dengan mudah memahami isi informasi dalam laporan keuangan tersebut dan segera untuk mengambil keputusan dalam hal penentuan kesehatan LPD dimasingg-masingg LPD.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh (Adiputra, 2017) dengan judul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP, Kualitas Pelatihan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Karangasem)". Kebaruan dari penelitian ini yakni penggabungan dari tiga variabel independen dalam menguji kualitas laporan keuangan. Jika pada penelitian yang dilakukan (Adiputra, 2017) beliau menggunakan variabel pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP, kualitas pelatihan dan sistem pengendalian internal.

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan sistem informasi akuntansi. Selain itu tempat penelitian-penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan lebih banyak dilakukan di koperasi, Bumdes, UMKM, SKPD, sedangkan untuk tempat penelitian yang diambil dalam penelitian kali ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai tempat penelitian yang rata-rata masih jarang diteliti.

Alasan dipilihnya variabel tingkat pendidikan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan LPD yang baik, baik pengurus maupun karyawan harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten terutama dalam hal pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi serta berkompeten di bidangnya masing-masingg akan mempermudah seseorang dalam bekerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut berkualitas sesuai dengan empat karakteristik kualitas laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Selain itu kecerdasan atau wawasan yang luas tentang akuntansi membuat kualitas laporan keuangan LPD yang telah disusun terhindar dari kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pemahaman pengurus mengenai akuntansi. Pada observasi yang dilakukan di LPD Se-Kecamatan Manggis, diperoleh informasi bahwa tingkat pendidikan pengurus maupun karyawan LPD rata-rata SMA/SMK. Selain itu diperoleh bahwa pengurus dibeberapa LPD masih perlu meminta bantuan ke LPD lainnya dalam pembuatan laporan keuangan, karena pengurus lpd kurang memahami penyusunan laporan keuangan.

Dipilihnya variabel kualitas pelatihan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini karena pengelolaan atau penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh

sumber daya manusia dengan baik tidak terlepas dari pelatihan-pelatihan yang diadakan dan dilakukan, hal tersebut guna meningkatkan skill maupun pemahaman serta wawasan pengurus dan karyawan LPD, dalam hal ini penyusunan laporan keuangan. Peningkatan pengetahuan, kemampuan serta sikap karyawan dijadikan tolak ukur kualitas pelatihan. Dengan adanya pelatihan yang berkualitas ini dapat memberikan *feedback* kepada pengurus dan organisasi dalam melakukan pekerjaan. Sehingga suatu pelatihan memiliki peranan besar bagi organisasi maupun karyawan dalam penyusunan suatu laporan yang berkualitas.

Dan terakhir pemilihan variabel sistem informasi akuntansi sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah dimasa sekarang penggunaan sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi dirasa sangat diperlukan guna mempermudah dalam pekerjaan dan meminimalisir kesalahan penginputan data. Artinya sistem informasi akuntansi di LPD ini memiliki peranan penting dalam memproses data menjadi informasi keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan laporan keuangan. Namun pada kenyataannya penggunaan sistem informasi di beberapa LPD di Kecamatan Manggis masih kurang. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman, buruknya jaringan serta kurangnya fasilitas yang mendukung penggunaan sistem informasi akuntansi ini.

Penggunaan variabel-variabel pada penelitian ini di dasarkan atas rendahnya tingkat Pendidikan, rendahnya kualitas pelatihan hal tersebut tentu berdanpak pada kualitas laporan keuangan LPD. Selain itu masih banyak LPD yang belum maksimal dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan dan kegiatan operasional lainnya yang

berhubungan pada kualitas laporan keuangan. Pentingnya penelitian ini dilakukan yakni untuk menilai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pengurus LPD.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Manggis".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul yaitu:

a. Tingkat pendidikan pengelola atau pengurus LPD yang hanya sampai jenjang SMA/SMK dengan jurusan yang bukan dari akuntansi, mengalami kesulitan dalam hal pengelolaan laporan keuangan.
b. Dilihat dari pelatihan-pelatihan yang telah diadakan terutama di masa pandemi seperti ini pengurus LPD yang mengikuti pelatihan kurang memahami ilmu yang yang didapatkan saat pelatihan berlangsung
c. Belum meratanya penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diketahui dari keterbatasan pemahaman, buruknya jaringan serta kurangnya fasilitas yang mendukung terhadap Sistem Informasi Akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pemberian pembatasan masalah memiliki tujuan agar pembahasan lebih terarah pada sasaran penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka penelitian ini berfokus pada variabel-variabel yang digunakan yakni tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Manggis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yakni:

a. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Manggis?
b. Bagaimana pengaruh kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Manggis?
c. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Manggis?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Manggis.
b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Manggis.
c. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Manggis.

1.6 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi pada bidang akuntansi, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau pihak terkait sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan LPD untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan sistem informasi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas laporan keuangan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi perpustakaan dalam hal kajian-kajian mengenai permasalahan tentang kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan LPD. Serta

dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh LPD melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi.